



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



PIDI 4.0
SHIFTING THEN INFINITY



BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karena itu, setiap Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan UU tersebut dan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebagai bagian dari Kementerian maka disusunlah Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2020-2024 yang pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Industri dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi Industri. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMI.

Renstra BPSDMI 2020-2024 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan pencapaian KPI yang akan diraih.

Jakarta, 29 Januari 2021

SEKRETARIS BPSDMI



YULIA ASTUTI

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1.Kondisi Pembangunan Industri Nasional.....	1
	1.2.Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri	4
	1.3.Potensi dan Permasalahan Pembangunan SDM Industri.....	8
BAB II	: VISI DAN MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI.....	10
	2.1. Visi , Misi dan Tujuan Strategis Pembangunan SDM Industri	10
	2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	13
	2.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Program Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.....	20
BAB III	: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	23
	3.1. Arah Kebijakan Pembangunan SDM Industri 2020-2024	23
	3.2. Arah Kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2020-2024	25
	3.3. Arah Kebijakan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2020-2024.....	46
	3.4. Program	51
	3.5. Kegiatan.....	51
	3.6. Kerangka Regulasi	51
	3.7. Kerangka Kelembagaan.....	53
BAB IV	: TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	56
	4.1. Target Kinerja	56
	4.2. Kerangka Pendanaan	58
BAB V	: PENUTUP.....	59

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Kondisi Pembangunan Industri Nasional

Visi Indonesia 2030 menyatakan Indonesia akan mejadi kekuatan kelima di dunia pada tahun 2030 bersama China, Amerika Serikat, India dan Uni Eropa. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 285 Juta jiwa, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US \$ 5,1 Trilyun dan pendapatan perkapita Indonesia US \$ 180 ribu Trilyun. Untuk mencapai asumsi tersebut, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi riil rata – rata 7,62% per tahun, Laju Inflasi 4,95% per tahun dan pertumbuhan penduduk rata – rata 1,12% per tahun.

Dalam Konteks Pembangunan Industri Nasional, dalam rangka menentukan arah, sasaran, dan kebijakan Pengembangan Industri Nasional ke depan, Pemerintah mengeluarkan **Undang – Undang Perindustrian No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian**, Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) difokuskan pada: **Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia** yang bercirikan:

1. Industri kelas dunia;
2. PDB sektor industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya **Negara Industri Maju Baru** sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan negara industri lainnya;
2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional;
3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar;
4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat);
5. Jasa industri yang tangguh.

Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan

ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu:

1. Meningkatnya nilai tambah industri;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. **Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan;**
4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;
5. Lengkap dan menguatnya struktur industri;
6. Tersebar nya pembangunan industri;
7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB.



Gambar 1. Faktor Penggerak Pertumbuhan Industri

Kunci dan faktor penggerak pertumbuhan industri adalah investasi dari dalam maupun luar negeri, teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi sehingga meningkatkan daya saing, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas industri. Dalam situasi dimaksud, maka untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pengembangan industri nasional memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas. Kebijakan yang mampu menjawab pertanyaan, arah dan bangun industri Indonesia dalam jangka menengah, maupun jangka panjang. Penyusunan dan

penetapan arah dan kebijakan tersebut memerlukan keterlibatan dan kesepakatan bersama dari seluruh potensi bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Amanat konstitusi harus dijabarkan sebagai pesan agar pengembangan industri dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi didasarkan pada upaya pendayagunaan seluruh potensi dan ragam sumber daya ekonomi yang dimiliki bangsa secara optimal dan arif, agar mampu menjadi wahana bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, pengembangan industri yang telah berjalan dengan baik selama ini harus diakui belum mampu menghasilkan atau mewujudkan bangun industri yang tangguh dan berakar dari keunggulan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi kekayaan sumber daya yang dimiliki.

Tanpa adanya arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, maka perkembangan industri akan tumbuh secara alami tanpa kejelasan bentuk bangun industri yang akan terjadi, karena beberapa hal:

- Secara internal masih terdapat gejala keinginan sektoral yang bersifat individual (belum terkonsolidasi), belum saling mengisi dan bersinergi.
- Secara eksternal akan berlaku kaidah pasar bebas, yaitu pasar dunia dengan kendaraan globalisasi dan liberalisasi akan memaksakan kehendak dan mendistorsi kepentingan nasional. Hal itu dimaksudkan agar sesuai dengan kehendak mereka, atau mematikan daya aspirasi, kreativitas, dan motivasi bangsa Indonesia.

Menurut RIPIN 2015-2035, sasaran dan tahapan pembangunan industri dibagi menjadi 3 (tiga) tahap: Tahap 1 (2015-2019): peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA), Tahap 2 (2020-2024): keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, dan Tahap 3 (2025-2035): Indonesia sebagai negara tangguh industri. Hingga tahun 2019, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan sektor industri non-migas sebesar 6,2% setiap tahunnya sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB. Besarnya kontribusi tersebut tercapai karena jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya.

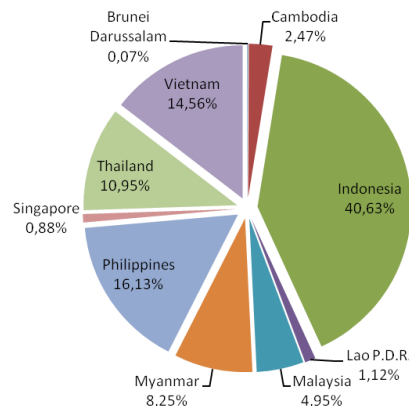


Gambar 2. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Manufaktur

Untuk mengatasi masalah tersebut dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri setiap tahunnya, diperlukan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat menjembatani antara siswa dengan industri. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan sub sistem yang berfungsi mewujudkan SDM yang kompeten baik pada tatanan manajerial maupun operasional. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selalu diarahkan pada terwujudnya SDM yang handal, efektif dan efisien baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

1.2 Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri

Sebelum mencapai Visi Indonesia 2030 tersebut, Indonesia menghadapi beberapa tantangan kedepan yang harus segera dipersiapkan lebih dini lagi. Pasar Bebas ASEAN 2015 dan Bonus Demografi 2025 akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri menuju Visi Indonesia 2030. persiapan dini tersebut, terutama dalam hal mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berdaya saing.



Gambar 3. Populasi Indonesia di ASEAN

Salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain khususnya ASEAN adalah bonus demografi yang besar. Indonesia merupakan negara

dengan populasi terbesar di ASEAN yang mencakup lebih dari 40% penduduk ASEAN. Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,44% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 172.951.002 jiwa atau sebesar 67.5% dari total penduduk Indonesia. Apabila dapat dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Namun sebaliknya, bila tidak dapat dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial berupa pengangguran sebagai contohnya.

Usia	Jumlah (%)	Pria (orang)	Wanita (orang)
0 – 14 Tahun	25,82	33.651.533	32.442.996
15 – 24 Tahun	17,07	22.238.735	21.454.563
25 – 54 Tahun	42,31	55.196.144	53.124.591
55 – 64 Tahun	8,18	9.608.548	11.328.421
>= 65 tahun	6,62	7.368.764	9.579.379

Tabel 1. Struktur Demografi Penduduk Indonesia

Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2017 terdapat 128 juta angkatan kerja dari 192 juta penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 121 juta bekerja tetapi lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia berpendidikan maksimum SMP dan yang berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah mencapai 87,9%. Yang masih menjadi masalah bagi pemerintah adalah jumlah pengangguran bersifat terbuka yang mencapai 7 juta jiwa dimana lebih kurang 37,6% berpendidikan maksimum SMP dan yang berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah mencapai kisaran 87,8%.

Melihat realitas yang terjadi dalam lingkup pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia sebenarnya belum siap untuk menyongsong Visi Indonesia 2030 dengan persiapan – persiapan awalnya seperti Pasar Bebas ASEAN dan Bonus Demografi. Fakta yang terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari elastisitas pertumbuhan

ekonomi dalam menyerap tenaga kerja cenderung menurun. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (Human Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini hanya 0,629 peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Kegagalan SDM hari ini merupakan bagian dari kegagalan perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selain itu belum adanya Road Map pengembangan SDM serta visi misi yang jelas dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2004 – 2025. dan pemerintah belum mampu meningkatkan secara signifikan masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah. Kegagalan ini dapat dilihat dengan realitas dari 250 Juta lebih penduduk Indonesia kurang lebih 35 Juta masyarakat merupakan masyarakat miskin. Dan perbandingan pendidikan masyarakat jauh terbalik 3,78% penduduk berpendidikan Sarjana dan 53,33% mendominasi berpendidikan SD, artinya 70% angkatan kerja tidak memiliki ketrampilan.

Kegagalan SDM di negara ini, dilandasi oleh 3 hal pokok yang tidak dapat dihindari yaitu pertama liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi. Kedua sistem pendidikan yang tidak link and match, dalam artian pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas bukan pada ketrampilan. Ketiga pembangunan SDM yang tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat di RPJNP 2004 – 2025 yang tidak menjadikan pembangunan SDM sebagai skala prioritas.

Oleh karena itu untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru dalam rangka pembangunan SDM Indonesia. Reformasi di bidang pendidikan menjadi lebih penting lagi yaitu dengan pendidikan yang murah, reformasi sistem pendidikan dengan link and match, job oriented dan pengajaran budi pekerti. Dan realokasi pengelolaan iklim tenaga kerja dan revitalisasi pendidikan dan latihan SDM dengan cara pembangunan infrastruktur baik fisik dan non fisik, regulasi tenaga kerja dan perbaikan bangunan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM menjadi prioritas program pembangunan nasional. Bangunan SDM baru melalui solusi tersebutlah di harapkan mampumengantar Indonesia menuju Visi Indonesia 2030 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Di samping itu pendidikan merupakan upaya mendukung pembangunan ekonomi yang memerlukan peranan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (hard skill), dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sering dirangkum sebagai keterampilan lunak (soft skill). Di samping itu, pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jati diri bangsa melalui antara lain pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping tujuan tersebut, undang-undang nomor 25/2004 juga menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: (1) rencana pembangunan jangka panjang; (2) rencana pembangunan jangka menengah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Dalam undang-undang dimaksud disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang

selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

1.3. Potensi dan Permasalahan Pembangunan SDM Industri

Memperhatikan Sasaran pembangunan industri nasional yang termuat dalam RIPIN bahwa pembangunan sdm industri ditujukan pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 3,2 persen per tahun dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen). Demi tercapainya target tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Industri memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri.

Menurut RIPIN 2015 – 2035, tenaga kerja industri akan bertambah rata-rata 600 ribu pekerja per tahun. Proyeksi tenaga kerja industri 5 tahun pada tabel 1 mengkonfirmasi hal tersebut. Dapat kita lihat pada tabel 1 bahwa pertumbuhan tenaga kerja tiap tahunnya adalah sekitar 700 ribu per tahun. Sementara itu, lembaga diklat dan lembaga sertifikasi yang ada saat ini belum mampu untuk memenuhi kapasitas pelatihan dan sertifikasi sebanyak itu per tahunnya. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengakuan tenaga kerja Indonesia, sehingga jumlah tersebut dapat terserap sepenuhnya di dunia industri.

Namun demikian, globalisasi menambah kompleksitas perkembangan pengembangan tenaga kerja industri. Menurut ASEAN Framework on Service Agreement (AFAS), perdagangan jasa di ASEAN dapat dilakukan dengan 4 cara, atau dikenal dengan 4 modes. Cara ke-4, atau Mode 4, mengacu kepada “movement of natural persons”, atau dengan kata lain, kehadiran tenaga kerja profesional asing di suatu negara untuk memberikan layanan jasanya. Dengan kata lain, Mode 4 merupakan suatu cara perdagangan jasa dengan cara menghadirkan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya keras membatasi hal tersebut, namun globalisasi merupakan sebuah gelombang besar yang tidak dapat terbandung lagi.

Saat ini, dampak globalisasi Mode 4 yang paling relevan dengan Indonesia adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu dekat. Semangat yang dibawa oleh MEA adalah “transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labour, and free flow of capital”. Dengan semangat tersebut, perpindahan tenaga kerja (antar sesama negara anggota

ASEAN akan menjadi semakin cepat. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat antar para pencari kerja. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, harus mempersiapkan suatu mekanisme peningkatan kompetensi SDM industri untuk menghadapi persaingan tersebut.

Permasalahan dalam pengembangan SDM industri tidak hanya soal jumlah dan kualitas, namun juga soal pengakuan kualifikasi. Salah satu isi kerjasama dalam MEA adalah mengenai “recognition of professional qualification”, atau dengan kata lain pengakuan kualifikasi dari tenaga kerja profesional. Pengakuan ini diakomodir melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) for professional services. MRA dari profesi tertentu mengatur bagaimana kualifikasi profesi tersebut diakui oleh ASEAN. MRA akan membuat satu lembaga yang mengakui kualifikasi profesional dari negara-negara ASEAN berupa sertifikat kompetensi, dan sertifikat kompetensi inilah yang akan diakui oleh semua negara ASEAN. Artinya, perpindahan tenaga kerja lintas negara nanti tidak hanya menggunakan ijazah, tetapi juga sertifikat tersebut. Untuk mengakomodir MRA tersebut, kita memerlukan suatu Standar Kompetensi Kerja yang dapat disandingkan dengan National Qualification Framework (NQF) milik negara lain, sehingga semua negara ASEAN memiliki pengertian yang sama mengenai kualifikasi profesional. Standar Kompetensi Kerja tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi dalam membuat program pendidikan, program pelatihan, dan materi uji kompetensi.

Dengan demikian, isu dalam pembangunan SDM industri antara lain adalah peningkatan jumlah, peningkatan kualifikasi, dan pengakuan kualifikasi baik dalam maupun dengan luar negeri.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, untuk itu, disusun visi dan misi pembangunan SDM Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

2.1. Visi , Misi dan Tujuan Strategis Pembangunan SDM Industri

2.1.1. Visi Pembangunan SDM Industri

“ Menjadi Pusat Pembangunan SDM Industri Kompeten Berdaya Saing Global”

2.1.2. Misi Pembangunan SDM Industri

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pendidikan Vokasi Industri Dual System;
2. Membangun Politeknik Industri di Kawasan Industri/WPPI;
3. Membangun Link and Match pendidikan vokasi dengan Industri;
4. Mengembangkan Pelatihan Industri berbasis kompetensi dengan Sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja);
5. Menumbuhkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis di lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. Membangun Infrastruktur Kompetensi (SKKNI, LSP, TUK, Asesor) dan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri;
7. Membangun Ekosistem dan Kompetensi SDM Industri 4.0;
8. Mengembangkan ASN pembina Industri pusat dan daerah yang kompeten; dan
9. Mengembangkan Konsultan industri yang kompeten.

2.1.3. Tujuan pembangunan SDM Industri

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, menetapkan tujuan pembangunan SDM Industri yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“ terbangunnya skema pengembangan yang terintegrasi untuk menghasilkan**

SDM Industri yang kompeten”. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan dalam Sasaran Strategis sebagaimana matrik dibawah ini :

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan	Pihak terkait
A. Pendidikan Vokasi Menuju Dual System Model Jerman		
	1. Peningkatan jenjang pendidikan pada Politeknik Industri	Dikti, BAN PT
	2. Pengembangan program studi baru sesuai kebutuhan dunia usaha industri	Dikbud, Dikti, BAN PT
	3. Penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi	Dikti
	4. Sertifikasi kompetensi bagi siswa/mahasiswa dan lulusan lembaga pendidikan vokasi	
B. Pengembangan Pendidikan Poltek/Akom di Kawasan Industri		
	1. Pembangunan Politeknik/ Akademi Komunitas pada WPPI dan KI	Asosiasi industri, Dikti
C. Pengembangan Link and Match dengan Industri		
	1. Pengembangan link and match antara lembaga pendidikan dan lembaga diklat dengan dunia usaha industri	Asosiasi & pelaku industri
	2. Sertifikasi kompetensi bagi siswa/mahasiswa dan lulusan lembaga pendidikan vokasi	
D. Pendidikan dan Pelatihan Sistem 3 in 1		
	1. Pemetaan kebutuhan (jumlah, jenis dan lokasi) lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat berbasis kompetensi sesuai dengan rencana kebutuhan SDM industri dan pembangunan industri di luar Jawa	Pemda, Asosiasi, Pelaku Industri, Dikti
	2. Pengembangan kurikulum pendidikan dan diklat berbasis kompetensi	asosiasi & pelaku industri
	3. Pengembangan modul pendidikan dan modul diklat berbasis kompetensi	
	4. Pengembangan sarana dan prasarana (laboratorium, workshop, teaching factory) pada lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat	
	5. Pengembangan unit inkubasi industri pada lembaga pendidikan vokasi dan Balai Diklat Industri	
	6. Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri	Asosiasi
	7. Diklat Pembina industri berbasis kompetensi	
	8. Evaluasi pemberdayaan tenaga konsultan diagnosis IKM	
	9. Penyelenggaraan diklat konsultan diagnosis IKM	
	10. Evaluasi Penyelenggaraan Program TPL Beasiswa	

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan	Pihak terkait
	11. Penyelenggaraan Program TPL Beasiswa	
E. Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja Industri		
	1. Pemetaan kebutuhan SKKNI, LSP, TUK dan asesor kompetensi bidang industri	Ditjen teknis, asosiasi
	2. Penyusunan dan penetapan SKKNI bidang industri <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Penyusunan SKKNI - Penyusunan SKKNI Sektor Industri - Pendampingan (fasilitasi teknis) Penyusunan SKKNI Sektor Industri - Fasilitasi Pra Konvensi dan Konvensi SKKNI Sektor Industri 	Naker, asosiasi industri
	3. Peningkatan kapasitas dan Fasilitasi pembentukan LSP dan TUK bidang industri <ul style="list-style-type: none"> - RCC asesor kompetensi - Pelatihan Penyusunan Dokumen LSP & skema uji - Fasilitasi Penyusunan Dokumen LSP dan Skema Sertifikasi - Fasilitasi Verifikasi TUK 	Naker, asosiasi industri, BNSP
	4. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri	Naker, asosiasi industri, BNSP
	5. Pelatihan calon asesor kompetensi dan asesor lisensi	Asosiasi industri, BNSP
	6. Penyusunan program pendidikan dan program diklat berbasis kompetensi	
	7. Pembentukan LSP dan TUK pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat industri	BNSP, Dikti
	8. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri persektor dan jenjang kualifikasi (KKNI)	
	9. Penyelenggaraan diklat wirausaha industri berbasis kompetensi	
	10. Pendidikan gelar bagi aparatur pembina industri	Dikti
	11. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Industri	Asosiasi Industri, BNSP
	12. Pengembangan kerjasama dengan Asosiasi Industri dan Pelaku Industri untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi TK Industri	Asosiasi Industri/ Profesi, BNSP
	13. Penyusunan Database Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Industri	Naker, Asosiasi, BNSP
	14. Pemetaan kesiapan sektor industri dalam penerapan SKKNI wajib	Asosiasi Industri, Naker
	15. Penyusunan kajian tentang sektor industri yang	Kemenaker,

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan	Pihak terkait
	perlu pelarangan tenaga kerja asing (negative list)	Asosiasi Industri
	16. Penyusunan kebijakan pelarangan penggunaan tenaga kerja LN pada sektor industri tertentu (negative list)	Kemenaker, KemkumHAM
F. Pengembangan SDM Menuju Industri 4.0		
	1. Pusat Inovasi dan Pengembangan Industri 4.0	
	2. Mini Plant Functional Textile and Clothing 4.0	
	3. Pilot Project Data dan Analytic Center Industri 4.0	

Tabel 2.1 Tujuan Pembangunan Industri

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Program Pembangunan SDM Industri, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan industri dituntut untuk menghasilkan SDM industri yang berkompeten dan berdaya saing global.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian dengan mencermati lingkungan, baik internal dan eksternal yang ada, maka **Visi, Misi dan Nilai** Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dirumuskan sebagai berikut:

2.2.1 VISI

Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri adalah **“Menjadi Pusat Pembangunan SDM Industri Kompeten Berdaya Saing Global”**, yang bercirikan :

1. Menjadi Institusi Pilihan Pertama dan Utama Penyedia Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi
2. Menjadi Rujukan Pengembangan Sistem Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berkarakter industri

3. Memiliki Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Industri berkarakter global , yang bercirikan :
 - a. Berpikir seperti pemimpin pasar
 - b. Menjadikan Nilai – nilai organisasi (Commitment ; Cooperation; Creativity; Competence; Good Counduct) sebagai landasan Budaya Kerja Organisasi
 - c. Fokus pada inovasi, kajian dan pengembangan
 - d. Mengedapankan Kualitas
4. Berkembangnya Komunitas kepakaran Industri Khususnya Dalam Bidang Teknologi Proses Industri, Kimia Analitik Industri , Manufaktur, TPT, Alas Kaki, Agro Industri dan Smelter Industri

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Misi Pada Tahun 2020 yakni **”Pelopor Institusi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi Yang Terpercaya Dalam Pengembangan SDM Industri Kompeten”**, yang bercirikan

:



Gamabr 2.1 Visi dan Misi BPSDMI

2.2.2 MISI

Menjadi pelopor best practice pendidikan Vokasi industri dan pelatihan Industri berbasis kompetensi, yang bercirikan:

1. Mengembangkan Pendidikan Vokasi Industri Dual System;
2. Membangun Politeknik Industri di Kawasan Industri/WPPI;
3. Membangun Link and Match pendidikan vokasi dengan Industri;
4. Mengembangkan Pelatihan Industri berbasis kompetensi dengan Sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja);
5. Menumbuhkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis di lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. Membangun Infrastruktur Kompetensi (SKKNI, LSP, TUK, Asesor) dan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri;
7. Membangun Ekosistem dan Kompetensi SDM Industri 4.0;
8. Mengembangkan ASN pembina Industri pusat dan daerah yang kompeten; dan
9. Mengembangkan Konsultan industri yang kompeten.

2.2.3 TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Perindustrian yaitu **“Menjadi role model dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi yang menghasilkan SDM Industri kompeten berdaya saing global”**. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian.

2.2.4 PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian melaksanakan 2 (dua) program yaitu **“Program Pengembangan SDM Industri”** melalui kegiatan

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, serta **“Program Dukungan Manajemen”** melalui kegiatan penyelenggaraan operasional dan keperluan perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

2.2.5 SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Industri dan Unit Kerja untuk periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

A. PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatkan Tenaga Kerja Industri yang Kompeten”, dengan indikator kinerja:

1. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi terhadap Tenaga Kerja Industri (TKI) melalui Diklat 3 in 1 yang ditargetkan pada tahun 2020 sebanyak 18.000 orang dan 20.000 pada tahun 2024.
2. Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya melalui Pendidikan vokasi tingkat ahli dan terampil dengan target 18.700 orang pada tahun 2020 serta 18.850 pada tahun 2024.
3. Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi internasional yang dilaksanakan pada masa pembelajaran tingkat terampil dengan target sebanyak 900 orang pada tahun 2020 dan 1.300 orang pada tahun 2024.
4. Presentase lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan dengan target prosentase 72% pada tahun 2020 dan 84% pada tahun 2024.

B. PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

Sasaran strategis pertama (SS-2) yang akan dicapai yaitu “Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri”, dengan indikator kinerja:

1. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dengan target 4 perusahaan di tahun 2020 menjadi 12 perusahaan pada tahun 2024.
2. Nilai minimum akreditasi program studi pada Politeknik Industri dengan target akreditasi minimum B di tahun 2020 menjadi A pada tahun 2024.
3. Penelitian yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional dengan target 100 judul penelitian di tahun 2020 menjadi 200 judul penelitian pada tahun 2024.
4. Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya melalui pelatihan serta pemagangan dengan target 60 orang di tahun 2020 menjadi 120 orang pada tahun 2024.
5. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi dengan target 1 pilot project di tahun 2020 menjadi 9 pilot project pada tahun 2024.

Sasaran strategis pertama (SS-3) yang akan dicapai yaitu “Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri”, dengan indikator kinerja:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri dengan target 10 SKKNI yang disusun per tahunnya hingga 2024.
2. Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri dengan target 20 LSP/TUK per tahun hingga 2024.
3. Asesor kompetensi dan lisensi melalui diklat assessor lisensi dan diklat RCC assessor dengan target 290 orang di tahun 2020 menjadi 330 orang di tahun 2024.
4. Wirausaha industri yang tumbuh melalui inkubator bisnis dengan target 150 orang di tahun 2020 menjadi 190 orang pada tahun 2024.
5. TPL hasil pendidikan dan pelatihan yang dimulai pada tahun 2021 dengan target 240 orang per tahunnya hingga 2024.

C. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output, outcome, maupun impact dari kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis pertama (SS-4) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri”, dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target 70 di tahun 2020 dan meningkat menjadi 78 pada tahun 2024

Sasaran strategis pertama (SS-5) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang profesional dan berkeperibadian ”, dengan indikator kinerja:

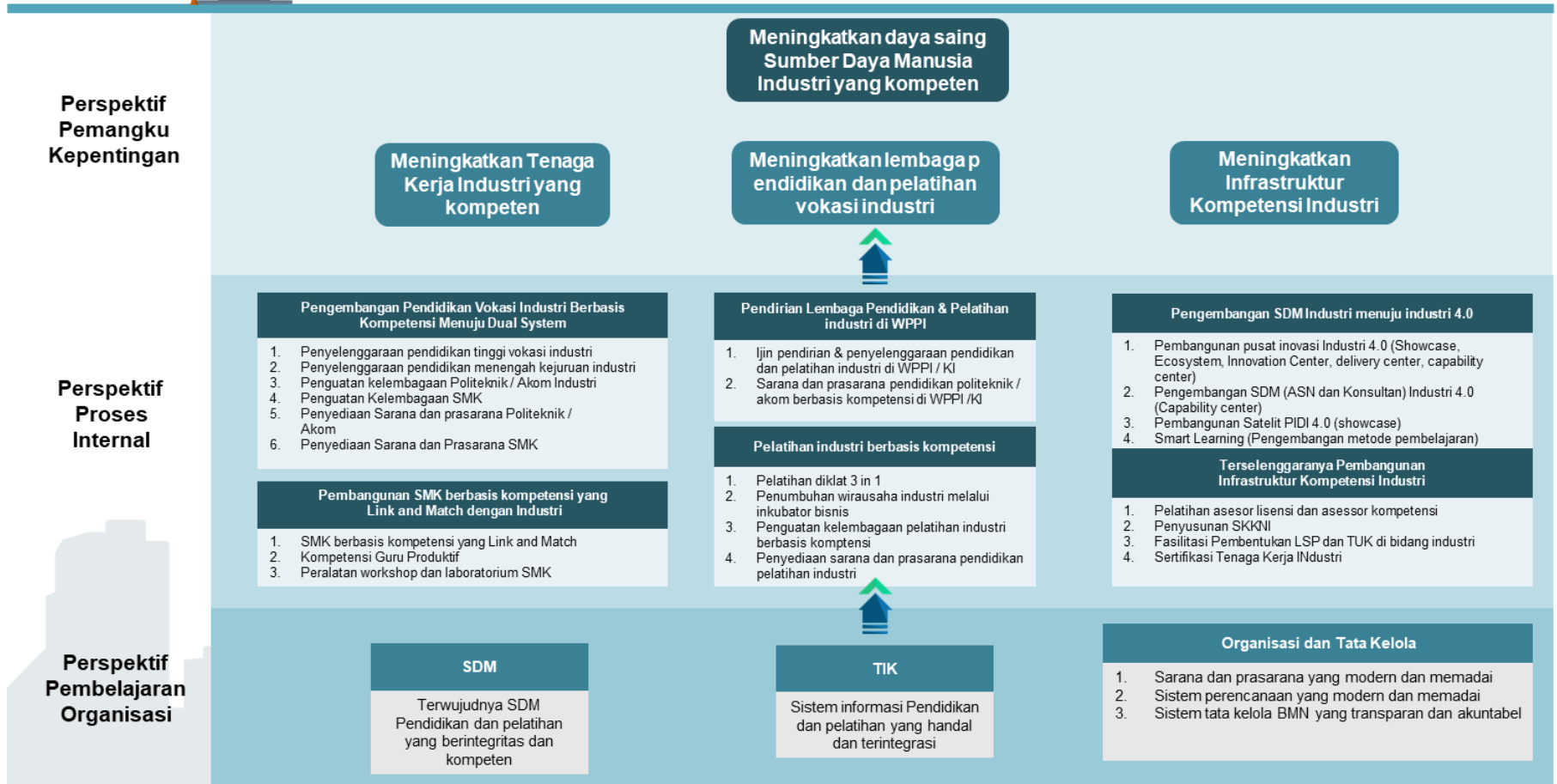
1. Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target indeks 70 di tahun 2020, meningkat menjadi 80 di tahun 2024

Sasaran strategis pertama (SS-6) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target 70 di tahun 2020, meningkat menjadi 78 di tahun 2024
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target 70% di tahun 2020, meningkat menjadi 78 di tahun 2024.



PETA STRATEGI BPSDMI TAHUN 2020-2024



Gamabr 2.2 Peta Strategis BPSDMI Tahun 2020-2024

2.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Program Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, maka Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di tuntut untuk menjadi supporting system dalam mendukung program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yaitu Program Pengembangan SDM Industri.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian dengan mencermati lingkungan, baik internal dan eksternal yang ada, maka Visi, Misi dan Nilai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dirumuskan sebagai berikut:

2.3.1 VISI

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menetapkan visi : **“Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional”**.

2.3.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi Sekretariat sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif yang optimal;
2. Meningkatkan kinerja organsasi yang prima melalui dukungan SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai; dan
3. Membangun Ekosistem dan Kompetensi SDM Industri 4.0.

2.3.3 TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima dengan indikator :

- a. Meningkatkan pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya

- Manusia Industri;
- b. Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang profesional dan berkepribadian;
 - c. Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

2.3.4 PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan di atas, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian melaksanakan program yang ditetapkan oleh BPSDMI yaitu : **“Program Pengembangan SDM Industri”** melalui kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

2.3.5 SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

A. PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri”**. Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target 70 di tahun 2020 dan meningkat menjadi 78 pada tahun 2024.

B. PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri”**. Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target 70 di tahun 2020 dan meningkat menjadi 78 pada tahun 2024.

C. PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

1. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai yaitu : **“Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkeperibadian”**. Dengan Indikator Kinerja yaitu : Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target indeks 70 di tahun 2020, meningkat menjadi 80 di tahun 2024.
2. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai yaitu : **“Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”**. Dengan Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Nilai laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target 70 di tahun 2020, meningkat menjadi 78 di tahun 2024.
 - b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intenal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan target 70 di tahun 2020, meningkat menjadi 78 di tahun 2024.
3. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai yaitu : **“Pengembangan SDM Industri Menuju Industri 4.0”**. Dengan Indikator Kinerja **Pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0”** dengan target 3 % utilisasi ditahun 2020, meningkat menjadi 95 % di tahun 2024.
4. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai yaitu : **“Pendirian Lembaga pendidikan & pelatihan industri di WPPI (Pengembangan Politeknik/ Akademi Komunitas)”** Dengan indikator kinerja **Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik/ Akademi Komunitas Industri** dengan target 1 unit ditahun 2020, meningkat menjadi 2 unit di tahun 2024.
5. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai yaitu : **“Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Industri”** dengan indikator kinerja **Jumlah ASN Kementerian Perindustrian dan tenaga kerja industri yang mengikuti Diklat Industri 4.0**. Target pada tahun 2020 adalah 500 orang. pada tahun 2024 tetap 500 orang.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri nasional diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional, dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2020-2024. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;

8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan industri nasional untuk periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan melalui (1) Peningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan (2) Peningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; dan (3) Perluasan Pasar dalam negeri dan ekspor.
2. Perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui Penumbuhan Populasi Industri untuk menambah populasi industri baik berskala besar, sedang maupun industri kecil.
3. Pengembangan Perwilayahan Industri, Khususnya di luar Pulau Jawa melalui: (1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Wilayah Pengembangan Industri; (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; (3) Pembangunan Kawasan Industri; (4) Pengembangan Sentra IKM.

Mencermati arah kebijakan pembangunan industri nasional tersebut, untuk itu arah kebijakan pembangunan SDM industri difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi struktur Industri melalui (1) Peningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana (2) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (4) Pembentukan Teaching Factory (5) Workshop Terintegrasi; dan (3) Pembentukan Inkubator Bisnis.
2. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pelatihan industri berbasis kompetensi struktur Industri melalui (1) Peningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana (2) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (4) Pembentukan Teaching Factory (5) Workshop Terintegrasi; dan (3) Pembentukan Inkubator Bisnis

3. Mengembangkan Infrastruktur Kompetensi bidang industri prioritas melalui (1) Penyusunan dan penetapan SKKNI (2) Pendirian LSP & TUK (3) Peningkatan jumlah assessor kompetensi dan Lisensi
4. Mendorong dan memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor industri serta penumbuhan wirausaha Industri.
5. Mempercepat sistem sertifikasi tenaga kerja industri melalui (1) fasilitasi sertifikasi kompetensi dan (2) penetapan sistem sertifikasi wajib
6. Pendirian dan Pengembangan pendidikan vokasi industri pada Perwilayahan Industri, Khususnya di luar Pulau Jawa.

3.2 ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 2020-2024

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan SDM industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menetapkan arah kebijakan yang menjadi fokus unit pendidikan vokasi industri dan balai diklat industri dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memelopori dan menjadi rujukan Pendidikan Vokasi Industri dan Pelatihan Industri berbasis Kompetensi, kriteria dan langkah pengembangan Pendidikan Vokasi Industri berbasis Kompetensi
 - a. Kurikulum berbasis kompetensi mengacu kepada SKKNI bidang industri
 - b. Link and Match dengan kebutuhan dunia usaha industri
 - c. Menggunakan modul pembelajaran berbasis kompetensi (setiap paket modul terdiri dari: buku kerja, buku informasi, dan buku penilaian) serta sistem pembelajaran CBT
 - d. Memiliki Teaching Factory, LSP dan TUK
 - e. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap siswa/mahasiswa dan lulusan

- f. Memiliki kerjasama dengan dunia usaha industri dalam rangka penyusunan kurikulum, pemagangan industri, dan penempatan kerja lulusan
 - g. Lulusannya dapat berkiprah/bersaing secara nasional dan internasional dengan kompetensi yang dimiliki
 - h. Peningkatan Kompetensi ASN melalui diklat dan program rintisan gelar
2. Mengembangkan Spesialisasi sebagai Icon Sekolah, setiap Politeknik/SMK dan Balai Diklat Industri harus memiliki satu spesialisasi dari program studi yang menjadi fokus (konsentrasi) pengembangan Politeknik/SMK dan menjadi icon / brand Politeknik/SMK di masyarakat dan dunia usaha industri
 3. Politeknik, SMK dan Balai Diklat Industri sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Industri yang Elite, harus mampu membangun persepsi dan pandangan masyarakat bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang elite dan menjadi pilihan utama.

Untuk menjadi Politeknik/SMK yang “elite” dalam pengertian Politeknik/SMK yang “terkenal”, disegani dan dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha industri, harus didukung dengan adanya :

- a. Tenaga Pengajar yang berkualitas, memiliki jenjang pendidikan minimal S2 dan diutamakan mayoritas S3 untuk Politeknik.
- b. Memiliki karya-karya ilmiah (berupa penelitian terapan) yang terkenal dan berskala internasional
- c. Mahasiswa/siswa berprestasi dalam kejuaraan/lomba di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan spesialisasi/skills yang dimiliki
- d. Politeknik/SMK memiliki partner dengan sekolah vokasi di LN untuk pengembangan kompetensinya,
- e. Politeknik/SMK memiliki banyak kegiatan pertukaran mahasiswa/siswa dan dosen/guru dengan universitas LN

4. Mengembangkan Workshop/Laboratorium yang terintegrasi/terpadu, dengan Konsep ruang pendidikan yang modern :
 - a. Flexible Concept, mengakomodasi kemudahan dalam pengaturan ulang ruangan apabila diperlukan
 - b. Multifunctional Space, berfungsi sebagai ruang belajar teori, ruang praktek sekaligus ruang diskusi.
 - c. Professional Look, Desain dan tampilan ruangan modern dan professional
 - d. Students take parts in preparation, Adanya keterlibatan mahasiswa/siswa dalam persiapan pembelajaran dan praktek
5. Mengembangkan Prodi dan meningkatkan jenjang Program Pendidikan Politeknik:
 - a. Pengembangan Prodi diarahkan untuk mendukung/memperkuat (strengthening) terhadap icon Politeknik dan sesuai dengan kebutuhan industri
 - b. Peningkatan jenjang Program pendidikan secara bertahap; yaitu: D-3 menjadi D-4; dan D4 menjadi S2 (magister) terapan,
 - c. Kuncinya adalah pada jumlah dosen, untuk Program S2: minimal 6 dosen tetap dengan kualifikasi S3 yang memenuhi syarat linearitas dan batas usia minimum.
 - d. Membangun sistem pembelajaran menggunakan block system
 - e. Membangun kolaborasi antara Akademi Komunitas dengan Politeknik yang memiliki kesamaan Prodi untuk melanjutkan jenjang pendidikan

SMK:

- a. Pengembangan Prodi sesuai spesialisasi dan kebutuhan industri
6. Meningkatkan jumlah Mahasiswa/Siswa, Jumlah Mahasiswa/Siswa Politeknik/SMK minimal harus memenuhi kapasitas (daya tampung) optimal sekolah yang dinilai layak dari sisi APBN, dengan tetap memperhatikan:

- a. Kualitas calon siswa/mahasiswa: rasio penerimaan minimal 1:3
 - b. Kapasitas kelas 30-40 orang, untuk itu perlu dilengkapi sarana pembelajaran, ruang kelas, workshop dan laboratorium sesuai target jumlah siswa/mahasiswa
 - c. Jumlah guru/dosen terhadap jumlah siswa/mahasiswa memenuhi standar rasio yang disyaratkan
 - d. Menjaga kualitas lulusan: “Seluruh lulusan harus terserap di Industri”
7. Mengembangkan Inkubator Bisnis
 8. Menyelenggarakan pelatihan industri dengan sistem 3 in 1
 9. Mendirikan dan mengembangkan Pendidikan tinggi Vokasi industri di setiap WPPI

Program Reposisi tahap 2 memiliki indikator pencapaian yang terbagi dalam 6 kelompok, yaitu:

Dalam pelaksanaannya, pembangunan tenaga kerja industri melalui 6 langkah tersebut memerlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga pendidikan dan pelatihan, pelaku usaha industri, asosiasi industri, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi profesi serta pemerintah yaitu kementerian terkait dan lembaga pemerintah lainnya.



Gamabr 3.1 Program Pengembangan BPSDMI

A. Pendidikan Vokasi Menuju Dual System Model Jerman

Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian menyelenggarakan pendidikan Diploma 1 hingga IV untuk menyediakan tenaga kerja ahli madya.

Untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang berkualitas dan berdaya saing, seluruh Politeknik dan Akademi Komunitas Industri Kementerian Perindustrian dilengkapi dengan workshop dan laboratorium yang dilengkapi dengan mesin dan peralatan yang sesuai dengan standar industri, sehingga lulusan pendidikan tinggi vokasi Kementerian Perindustrian adalah lulusan yang kompeten dan berdaya saing di bidang industri serta siap kerja.

A.1 Semboyan SMK Kemenperin “*Sekali Dayung 5 + 2 Pulau Terlampaui*”

1. Ijazah dengan hasil dan nilai UN terbaik
 - a. Pendidikan yang berkualitas
 - Meningkatkan Rasio Pendaftar dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Industri
 - Mengembangkan Kurikulum dan modul pembelajaran yang digunakan dalam sistem pembelajaran
 - Sistem Pembelajaran menggunakan Workshop & Lab Terintegrasi Standar Industri
 - Melaksanakan Praktik Kerja Industri selama 6 s/d 12 bulan
 - Mengadakan bimbingan belajar bagi siswa untuk menghadapi UN
 - b. Peningkatan mutu Tenaga Pendidik
 - Pendidikan lanjutan (S2) bagi guru sesuai dengan bidang studinya;
 - Membekali guru dengan kompetensi teknis dan industri sesuai spesialisasi yang dimiliki BDI melalui pemagangan guru di industri; dan
 - Memanfaatkan praktisi dari industri sebagai tenaga pengajar atau instruktur di sekolah.
2. Sistem pendidikan yang berbasis kompetensi sehingga lulusan akan mendapatkan sertifikat kompetensi, diantaranya:
 - a. LSP Pihak 1
 - Menyusun SKKNI dan mengembangkan skema sertifikasi kompetensi untuk setiap paket pembelajaran

- Melaksanakan uji kompetensi kepada semua siswa setiap akhir tahun ajaran
 - Menjalin kerjasama dengan pihak lain (Asosiasi, perusahaan industri dan lembaga pendidikan lain) untuk penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sesuai ruang lingkup yang dimiliki oleh LSP P-1 SMK.
 - Memanfaatkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ada di SMK untuk pelaksanaan uji kompetensi, baik oleh LSP Pihak 1 SMK atau LSP lain yang memiliki ruang lingkup sama.
- b. Asesor Kompetensi
- Menyiapkan asesor kompetensi yang sesuai dengan paket keahlian atau skema sertifikasi
 - Memastikan seluruh asesor kompetensi telah memiliki kompetensi teknis untuk melakukan pengujian kompetensi lulusan diklat
 - Senantiasa memperbaharui kompetensi para asesor kompetensi
3. Sertifikat internasional untuk lulusan berdaya saing
- a. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional (Vapro Belanda atau Australia);
 - b. Melakukan pemetaan standar kompetensi dan kurikulum dibandingkan dengan standar internasional;
 - c. Rekognisi standar kompetensi dan kurikulum yang digunakan SMK oleh lembaga sertifikasi internasional;
 - d. Pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga pengajar sesuai standar internasional; dan
 - e. Menyelenggarakan magang bagi siswa di luar negeri
 - f. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi internasional pada siswa.
4. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris untuk bersaing di pasar kerja internasional.
- a. Menjalin kerjasama dengan lembaga bahasa asing bersertifikat;
 - b. Menetapkan standar nilai TOEFL/TOEIC/IELTS untuk kelulusan siswa;
 - c. Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris di sekolah khususnya bagi siswa kelas akhir; dan

- d. Memberikan sertifikat kemampuan bahasa Inggris bagi siswa yang telah memenuhi standar.
5. Seluruh lulusan terserap sepenuhnya industri
 - a. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri untuk prakerin dan penempatan kerja lulusan;
 - b. Menjalankan program guru masuk industri (atau dalam kegiatan magang guru) untuk mencari peluang kerja bagi siswa/lulusan;
 - c. Menyelenggarakan bursa kerja dengan mengundang berbagai perusahaan industri;
 - d. Menjalin komunikasi dengan industri dalam mengevaluasi kinerja dan pengembangan karir lulusan yang telah bekerja; dan
 - e. Memberdayakan ikatan alumni untuk memfasilitasi penempatan kerja dan membuka akses kerja baru.
6. Pengembangan Pilot Project Pendidikan Dual System
 - a. Menjaring Industri untuk berkomitmen terhadap penyelenggaraan *dual system*
 - b. Melibatkan Industri dalam proses pembelajaran
 - c. Pengembangan *blended learning* dan *e-learning* untuk implementasi *dual system*
 - d. Pelatihan pedagogik bagi Instruktur di Industri
 - e. Penyusunan kurikulum *dual system* bersama Industri
 - f. Pengembangan *teaching factory*, workshop, laboratorium terintegrasi
 - g. Penyusunan jadwal blok sistem untuk implementasi *dual system*.
7. Pengembangan Kompetensi Industri 4.0
 - a. Pengembangan kurikulum & modul pembelajaran Industri 4.0
 - b. Mengimplementasikan materi pembelajaran dasar Industri 4.0
 - c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan industri 4.0
 - d. Pengembangan Online learning dalam kegiatan belajar mengajar

A.2 Pengembangan Politeknik untuk “Meraih 5 + 2 Keunggulan Kompetitif”

1. Pusat Penyedia tenaga kerja Industri yang kompeten
 - a) Pendidikan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri
 - Mengembangkan kurikulum dan modul sesuai kebutuhan sektor industri berdasarkan SKKNI dan pengembangan teknologi;

- Mengembangkan model pembelajaran modular atau blok waktu;
 - Magang industri bagi dosen untuk penguasaan kompetensi teknis; dan
 - Melibatkan praktisi industri dalam kegiatan belajar mengajar.
- b) Pemagangan di Industri
- Magang mahasiswa di industri minimal 1 tahun untuk Diploma III dan 1,5 tahun untuk Diploma IV
- c) Pengembangan brand image
- Meningkatkan promosi kepada masyarakat dan dunia usaha industri; dan
 - Peningkatan peran alumni dalam membentuk brand image Politeknik di kalangan industri.
- d) Sertifikasi Kompetensi
- Menyusun SKKNI dan mengembangkan skema sertifikasi kompetensi, setiap prodi minimal memiliki 1 skema kompetensi agar seluruh lulusan bisa disertifikasi; dan
 - Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional untuk sertifikasi profesi tertentu.
2. Pusat R&D Produk dan Teknologi
- a) Pengembangan *Teaching Factory*, *Workshop* dan Laboratorium
- Melengkapi workshop, laboratorium dan TF yang mendukung pengembangan penelitian dan praktek
 - Penataan dan pengelolaan *Teaching Factory*, *Workshop* dan Laboratorium secara professional dan berstandar internasional
- b) Pengembangan penelitian terapan
- Mengikuti perkembangan industri sesuai dengan bidang spesialisasinya, dan mengembangkan penelitian terapan berorientasi industri
 - Mengembangkan kerjasama dengan dunia industri untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan di industri
 - Bersama industri menggunakan fasilitas *workshop* dan laboratorium di kampus untuk penelitian bersama
- c) Pengembangan Paten

- Mendaftarkan hasil penelitian terapan yang telah teruji di industri untuk mendapatkan paten

3. Pusat Pelayanan Industri

a) Pelayanan jasa pengujian

- Melengkapi fasilitas untuk pengujian sesuai dengan bidang industrinya
- Menyiapkan tenaga penguji/asesor yang tersertifikasi
- Memproses ijin pendirian LSPro di kampus
- Membuat standar prosedur pengujian dari industri di kampus
- Pengelolaan LSPro di kampus secara professional untuk pelayanan pengujian

b) Layanan jasa produksi bagi industri

- Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan penyedia mesin dan peralatan industri untuk menyediakan fasilitas praktek dan miniplant di kampus
- Mengembangkan kerjasama dengan industri untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas praktek (workshop, laboratorium) di kampus bersama dengan industry

4. Peningkatan Akreditasi

a) Pelaksanaan Asesmen Mandiri dan Re-Akreditasi

- Membentuk tim peningkatan akreditasi untuk setiap program studi yang dikawal langsung oleh direktur Politeknik
- Mengadakan pelatihan pengisian borang akreditasi dan pelatihan pelaksanaan asesmen akreditasi bekerjasama dengan BAN-PT
- Melengkapi seluruh komponen penilaian yang kurang
- Mengajukan Re-akreditasi program studi apabila hasil penilaian asesmen mandiri sudah baik

b) Komponen Borang Akreditasi yang perlu diperhatikan

- Meningkatkan rasio pendaftar terhadap mahasiswa untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas
- Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan industri dan mengembangkan *career development center (CDC)* untuk penempatan kerja lulusan 100% dengan masa tunggu maksimal 6 bulan.

- Peningkatan jenjang pendidikan dosen S2 dan S3 yang linier dan sesuai kompetensinya pada program studi
- Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi tenaga pendidik dan sertifikasi profesi
- Melengkapi sarana prasarana pendidikan dan fasilitas praktek yang sesuai dengan industri
- Pengembangan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi dan memudahkan pembelajaran
- Peningkatan karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terindex scopus dan jurnal internasional

5. Peningkatan Kerjasama dan Mutu Dosen

a) Kerjasama dengan unit pendidikan yang sesuai dengan spesialisasinya terutama di Luar Negeri.

- Menindaklanjuti kunjungan ke luar negeri dengan membangun kerjasama dengan Politeknik/universitas yang memiliki program studi sejenis
- Mengembangkan penelitian terapan bersama dengan Politeknik/universitas yang memiliki program studi sejenis
- Mengembangkan kurikulum mengacu pada perkembangan kurikulum di Politeknik/universitas di Luar Negeri yang memiliki program studi sejenis
- Mencari akses kerjasama dengan industri di luar negeri melalui Politeknik/universitas yang memiliki mitra industri

b) Kerjasama dengan Industri dan asosiasi

- Menjalin kerjasama dengan industri dan asosiasi untuk pelaksanaan magang mahasiswa dan dosen serta penempatan kerja lulusan
- Pemanfaatan praktisi industri sebagai tenaga pengajar dan instruktur di kampus
- Mengembangkan proyek kerjasama dengan industri, antara lain menerima order untuk praktikum mahasiswa, pengembangan program pendidikan dan pelatihan khusus, penelitian (R&D) untuk inovasi produk dan proses di industri.

c) Peningkatan Mutu Dosen

- Peningkatan jenjang pendidikan dosen S2 dan S3 yang linier dan sesuai kompetensinya pada program studi
 - Setiap dosen minimal memiliki 1 sertifikasi profesi di bidang teknis yang sesuai
6. Pengembangan Pilot Project Pendidikan Dual System
 - a. Pembelajaran menggunakan Blok Waktu; dan
 - b. Komitmen dan kerjasama industri.
 7. Pengembangan Kompetensi Industri 4.0
 - a. Pengembangan kurikulum dan riset mendukung industri 4.0; dan
 - b. Pilot Project Implementasi Industri 4.0.

B. Pembangunan Politeknik WPPI

Pembangunan Politeknik WPPI diwujudkan dengan Penyelenggaran Politeknik/Akademi Komunitas Di Kawasan Industri Menggunakan Konsep Dual System yang terdiri atas:

- i. Kemitraan dengan Industri
Diselenggarakan bersama antara sekolah dan Industri, meliputi kurikulum, pengajar, rekrutmen siswa, prakerin, penempatan kerja
- ii. Program Studi & Kurikulum
Disusun bersama industri mengacu pada standar kompetensi, dengan komposisi praktek mencapai 70%
- iii. Sistem Pembelajaran
Sistem modular dan blok waktu, secara terintegrasi di sekolah dan di tempat kerja dengan komposisi mencapai 50:50
- iv. Tenaga Pengajar
Guru memiliki kompetensi sesuai bidang yang diajarkan, dan instruktur industri untuk praktek di industri
- v. Sarana Praktikum
Dilengkapi laboratorium dan workshop dengan peralatan praktik yang memadai
- vi. Penyerapan Lulusan
Lulusan kompeten sesuai kebutuhan Industri dan langsung terserap di Industri bahkan telah dipesan oleh Industri

Kemudian diikuti dengan 3 Model Perkuliahan:

1. Per Semester 2,5 bulan di Kampus dan 2,5 bulan di Industri;
2. Setiap akhir tahun 4 bulan di industri; dan
3. Model 3-2-1: 3 Semester di kampus, 2 Semester di industri, 1 Semester proyek akhir di Kampus.

C. Program Link and Match SMK dengan Industri

Dasar hukum pelaksanaan program Link and Match adalah sebagai berikut:

- i. Kementerian Perindustrian ditugaskan untuk, al:
 - Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas kepada SMK untuk Prakerin Siswa dan Magang Guru.
 - Mendorong Industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan teaching factory dan infrastruktur
- ii. Ratas Pendidikan Vokasional dan Arahan Presiden
 - Reorientasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi kearah *demand driven*
 - Model Pengembangan pendidikan Kejuruan dan Vokasi Kemenperin dapat dijadikan contoh dan diperbanyak
- iii. Penandatanganan MoU 5 Menteri:
 - Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi berbasis Kompetensi yang link and match dengan industri
- iv. Permenperin Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan SMK
 - Pembinaan SMK, meliputi penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan industri, pengadaan peralatan praktek, peningkatan kualitas guru
 - Peran industri memfasilitasi prakerin siswa dan magang guru, penyediaan instruktur/silver expert, serta sarana Prakerin dan Magang,
 - Dukungan pemerintah, fasilitasi infrastruktur kompetensi, sarana praktikum SMK, peningkatan kompetensi guru produktif, insentif bagi industri

Dalam pelaksanaan Program Link and Match dengan Industri, terdapat tugas dan tanggung jawab antar kedua pihak, yakni sekolah dan industri yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung jawab Sekolah :
 - Melakukan penyesuaian kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri;
 - Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan Praktikum;
 - Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang produktif melalui pelatihan, pemagangan, dan/atau pemberdayaan karyawan purna bakti dari industri
 - Menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan magang industri bagi guru sesuai dengan bidang kompetensi;
 - Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa
2. Tugas dan Tanggung Jawab Industri
 - Memberikan masukan dalam penyesuaian kurikulum di SMK;
 - Memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
 - Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
 - Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana untuk prakerin dan magang (*workshop, laboratorium, teaching factory*);
 - Mengeluarkan sertifikat telah mengikuti praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri.

Selain itu, terdapat potret dan tantangan SMK, diantaranya:

1. 14.200 SMK; 5.02 juta siswa; 146 jenis kompetensi, 34 jenis (23%) kompetensi industri;
2. 329.000 guru, hanya terdapat 22% guru produktif, 78% guru normatif dan adaptif. seharusnya minimal 60% guru produktif;
3. Peralatan praktikum di SMK tertinggal dengan industri, 30% tertinggal 2 generasi;
4. Pembelajaran masih dominan teori (60% teori dan 40% praktik) dan sedikit melibatkan industri (seharusnya 60% praktek dan 40% teori); dan
5. Presentase lulusan SMK yang menganggur lebih tinggi dibanding SMU.

langkah-langkah pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri yang dapat dijabarkan:

1. Peluncuran Program *Link and Match*
Pencanangan program kerja sama antara Industri dengan SMK. Satu perusahaan industri pembina memilih 5 SMK binaan yang memiliki bidang keahlian sektor industri;
2. Penyelarasan Kurikulum, Silabus & Modul
Penyusunan materi pembelajaran sisipan yang dibutuhkan industri ke dalam mata pelajaran di SMK. sudah tersusun kurikulum, silabus dan modul pembelajaran untuk 34 Bidang Keahlian sesuai dengan kebutuhan industri;
3. Peningkatan Kompetensi Guru
Pelatihan Guru Produktif
Magang guru di industri, dan
Penyediaan silver expert 100 orang;
4. Memenuhi Kebutuhan Minimum Sarana Praktek
Penyiapan teaching factory, Laboratorium, Workshop dan peralatan praktek di SMK, oleh Kemenperin, Kemendibud, Pemda dan Industri;
5. Membangun Infrastruktur Kompetensi
Penyusunan SKKNI sektor industri, pendirian LSP, TUK serta penyiapan Asesor Kompetensi untuk SMK;
6. Praktek Kerja Industri
Prakerin bagi siswa berdasarkan kurikulum pembelajaran berbasis kompetensi; dan
7. Sertifikasi
Melakukan sertifikasi terhadap siswa sehingga lulusan SMK selain mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikat.

D. Pendidikan dan Pelatihan Sistem 3 in 1

Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten tingkat terampil, melalui pelatihan berbasis kompetensi serta penempatan kerja pada perusahaan industri. Untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas, setiap Balai Diklat Industri dilengkapi

dengan fasilitas pelatihan yang lengkap dengan workshop dan unit produksi, serta asrama bagi peserta pelatihan.

D. 1 Semboyan BDI: “Mewujudkan Diklat 3 IN 1 Profesional”

Dalam mewujudkan Diklat 3 in 1 Profesional, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan

a. Jenjang dan jenis diklat

- Bersama industri menyiapkan kurikulum dan modul diklat berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri, untuk setiap jenjang dan jenis diklat.
- Mengembangkan jenjang dan jenis diklat sesuai kompetensi dan spesialisasi yang dimiliki, berdasarkan kebutuhan industri.
- Menyelenggarakan diklat 3 in 1 sesuai kompetensi dan spesialisasi yang dimiliki.

b. Penyelenggaraan profesional

- Bekerja sama dengan industri menjangkau dan menyeleksi calon peserta diklat.
- Menguasai setiap tahapan yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi.
- Menjadi tim solid sebagai penyelenggara diklat (training provider) mewakili instansi BDI dan Kementerian Perindustrian, bukan hanya tugas satu seksi pada BDI.
- Menyiapkan dan memastikan kesiapan seluruh sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan diklat.

c. Kompetensi instruktur

- Melibatkan pihak industri sebagai tenaga instruktur diklat sesuai bidang kompetensi yang dimiliki.
- Bekerja sama dengan beberapa lembaga training industri dalam hal penyediaan tenaga instruktur diklat.
- Membekali Widyaiswara dengan kompetensi teknis dan kondisi lingkungan pekerjaan yang dihadapi pada setiap industri sesuai spesialisasi yang dimiliki BDI.

2. Penempatan

- a. Menjalin kerjasama dengan perusahaan industri untuk penyelenggaraan diklat dan penyerapan lulusan.
- b. Melakukan evaluasi kinerja terhadap lulusan diklat yang telah ditempatkan pada masing-masing perusahaan industri.
- c. Mengikuti perkembangan posisi lulusan diklat setelah ditempatkan pada perusahaan industri.
- d. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang telah menjadi lokasi penempatan lulusan diklat.

3. Pengembangan Inkubator Bisnis

Selain itu Bagi unit pendidikan dan balai diklat, Indikator yang terpenting dalam Kebijakan ini adalah “Mewujudkan Wisata Pendidikan Vokasi”



Gambar 3.2 Penyelenggaraan Inkubator Bisnis

E. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri

Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan demi mencetak tenaga kerja industri yang memiliki sertifikat kompetensi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk LSP, TUK, serta assessor kompetensi.

- a. LSP Pihak 1 BDI
 1. Menyiapkan dan mengembangkan skema sertifikasi sesuai Paket Pelatihan yang dilaksanakan.
 2. Melaksanakan uji kompetensi kepada peserta diklat secara independen, obyektif dan sesuai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.

3. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain (Asosiasi, perusahaan industri dan lembaga pelatihan lain) untuk penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sesuai ruang lingkup yang dimiliki oleh LSP Pihak 1 BDI.
 4. Memanfaatkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ada pada BDI untuk pelaksanaan uji kompetensi, baik oleh LSP Pihak 1 BDI atau LSP lain yang memiliki ruang lingkup sama.
- b. Asesor Kompetensi
1. Menyiapkan asesor kompetensi sesuai kebutuhan pengujian LSP Pihak 1 BDI.
 2. Senantiasa memperbaharui kompetensi para asesor kompetensi.
 3. Memastikan seluruh asesor kompetensi telah memiliki kompetensi teknis untuk melakukan pengujian kompetensi lulusan diklat.
- c. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
1. Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan diklat struktural, fungsional, dan teknis bagi ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
 2. Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan program rintisan gelar S2/S3 mandiri serta beasiswa bagi ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri



Gambar 3.3 Pembangunan Infrastruktur Kompetensi



Gambar 3.4 Standar Kompetensi Kerja Nasional

F. Pengembangan SDM Menuju Industri 4.0

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Making Industri 4.0, akan membangun Digital Capability Center (DCC) untuk pengembangan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 yang akan dibangun di Permata Hijau Jakarta melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kosep pengembangan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 dilakukan melalui tiga tahap dalam periode 2.5 tahun yang terdiri dari:
 - a. Desain dan Pengembangan (6 Bulan sebelum peluncuran):
 - Menyempurnakan visi strategis dan prioritas seluruh pilar;
 - Menetapkan “manufaktur produk akhir”;
 - Menyusun dan menyesuaikan modul untuk pembelajaran;
 - Menyusun skema dan tata kelola ekosistem bagi DCC;
 - Mendorong adopsi INDI4.0;
 - Mengidentifikasi dan melibatkan institute untuk berkerja sama dalam penelitian;
 - Merancang struktur organisasi dengan tugas dan kebutuhan keahlian ahli yang jelas.
 - b. Peluncuran dan Pilot (1 Tahun):
 - Menyusun visi untuk industri-industri lainnya;
 - Meningkatkan teknologi dan solusi pada showcasae F&B dan otomotif;
 - Menyelesaikan modul pembelajaran khusus jaringan DCC;

- Melibatkan penyedia teknologi dan pemangku kepentingan ekosistem;
- Membantu perusahaan dalam perjalanan transformasi digital;
- Mengelola program riset pertama antara anchor user dan institut riset terpilih.

c. Pelaksanaan (1 Tahun):

- Mengawasi penyelesaian pendirian 1 DCC untuk setiap sektor industri;
- Mengambil modul pembelajaran baru dari jaringan global DCC;
- Mengembangkan dan menciptakan ekosistem lokal untuk DCC satelit;
- Mengembangkan kapabilitas pelaksanaan pada DCC satelit;
- Menyediakan informasi terkait tren teknologi I4.0 bagi ekosistem.
- Mengelola program riset pertama antara anchor user dan institut riset terpilih.

2. Tujuan pengembangan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 adalah menjadi “Solusi atap untuk adopsi Industri 4.0 di Indonesia” yang didukung oleh 5 pilar utama, yaitu:

- a. Show case center untuk meningkatkan kesadaran mengenai Industri 4.0 dengan menunjukkan “perusahaan model” untuk industry makanan & minuman (F&B) dan otomotif;
- b. Capability center untuk membangun kapabilitas i4.0 bagi perusahaan-perusahaan Indonesia di setiap tingkatan dalam organisasi (mulai dari level CxO hingga front line);
- c. Ekosistem Industry 4.0 untuk menghubungkan semua pemangku kepentingan i4.0 yang berpengaruh untuk memberikan keahlian dan kapabilitas khusus mereka untuk Indonesia;
- d. Delivery center untuk membantu perusahaan-perusahaan pada saat perjalanan mereka mengadopsi Industri 4.0 – mulai dari tahap penilaian (INDI 4.0) hingga implementasi;
- e. Innovation Center dalam pelayanan pengujian dan penelitian.
yang didukung oleh landasan organisasi, tata kelola dan kapabilitas kuat serta model bisnis berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun mendatang;

3. Konsep kerjasama pengembangan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 melingkupi:

- a. Menyempurnakan visi strategis DCC Permata Hijau;
 - b. Membangun end-to-end showcase untuk industri otomotif dan F&B;
 - c. Mengembangkan capability center;
 - d. Mengembangkan ekosistem dan pelaksanaan industry 4.0 di Indonesia;
 - e. Merancang Delivery center untuk menangani 2 inisiatif utama penilaian dan implementasi;
 - f. Membangun innovation center di Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 dengan 2 proposisi utama: sebagai sarana pengujian dan menjembatani penelitian;
 - g. Menetapkan organisasi dan kapabilitas sebagai landasan bagi Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 untuk mempertahankan operasionalnya.
4. Dukungan kelembagaan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 antara lain:
- a. Kelompok pimpinan inti dengan kombinasi berbagai pengalaman;
 - b. Tim kerja inti yang terdiri dari Project Manager berpengalaman yang dibantu oleh beberapa orang konsultan;
 - c. Kumpulan tenaga ahli regional inti yang mewakili beberapa industri utama yaitu F&B dan otomotif;
 - d. Dewan penasihat global yang memiliki pengetahuan dalam industri otomotif dan F&B



Gambar 3.5 Pembangunan Pusat Inovasi 4.0

Disamping itu, pembangunan kompetensi SDM untuk mendukung industri 4.0 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Redesign Jurikulum mengacu 4.0
- b. Pengembangan Riset Industri 4.0 pada Politeknik
- c. Program S2 DD Konsentrasi Industri 4.0
- d. Pelatihan SDM bidang Industri 4.0
- e. Pusat Inovasi & Lembaga Riset Industri 4.0
- f. Pengembangan Politeknik mendukung Industri 4.0
- g. Pengembangan Program Studi Industri 4.0
- h. Pengembangan Online Learning

dan kompetensi teknis yang dikembangkan diantaranya:

1. Internet of Things
 - Sensor & Actuator
 - Hardware
 - Network
 - Coding & Programming
 - Apps Developing
2. Big Data
 - Analisis & Komputasi Data
 - Advance Database
 - Data Warehouse
 - Data Cyber Security
3. Artificial Intelligence
 - Robotic
 - Sistem Informasi
 - Micro Controller
4. Augmented/ Virtual Reality
5. Cloud Computing
 - Infrastructure as a service (IAAS)
 - Platform as a service (PAAS)
 - Software as a service (SAAS)
6. Digital Production Manufacturing
 - Flexible Manufacturing System

- Additive Manufacturing

7. Softskill Flexibility

3.3 ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 2020-2024

Sejalan dengan arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menetapkan arah kebijakan yang menjadi fokus unit pendidikan vokasi industri dan balai diklat industri dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

A. Pembangunan Politeknik WPPI

Pembangunan Politeknik WPPI diwujudkan dengan Penyelenggaraan Politeknik/Akademi Komunitas Di Kawasan Industri Menggunakan Konsep Dual System

B. Pengembangan SDM Menuju Industri 4.0

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Making Industri 4.0, akan membangun Digital Capability Center (DCC) untuk pengembangan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 yang akan dibangun di Permata Hijau Jakarta melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kosep pengembangan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 dilakukan melalui tiga tahap dalam periode 2.5 tahun yang terdiri dari:
 - a. Desain dan Pengembangan (6 Bulan sebelum peluncuran):
 - Menyempurnakan visi strategis dan prioritas seluruh pilar;
 - Menetapkan “manufaktur produk akhir”;
 - Menyusun dan menyesuaikan modul untuk pembelajaran;
 - Menyusun skema dan tata kelola ekosistem bagi DCC;
 - Mendorong adopsi INDI 4.0;

- Mengidentifikasi dan melibatkan institute untuk berkerja sama dalam penelitian;
- Merancang struktur organisasi dengan tugas dan kebutuhan keahlian ahli yang jelas.

2. Peluncuran dan Pilot (1 Tahun):

- Menyusun visi untuk industri-industri lainnya;
- Meningkatkan teknologi dan solusi pada showcasae F&B dan otomotif;
- Menyelesaikan modul pembelajaran khusus jaringan DCC;
- Melibatkan penyedia teknologi dan pemangku kepentingan ekosistem;
- Membantu perusahaan dalam perjalanan transformasi digital;
- Mengelola program riset pertama antara anchor user dan institut riset terpilih.

3. Pelaksanaan (1 Tahun):

- Mengawasi penyelesaian pendirian 1 DCC untuk setiap sektor industri;
- Mengambil modul pembelajaran baru dari jaringan global DCC;
- Mengembangkan dan menciptakan ekosistem lokal untuk DCC satelit;
- Mengembangkan kapabilitas pelaksanaan pada DCC satelit;
- Menyediakan informasi terkait tren teknologi I4.0 bagi ekosistem.
- Mengelola program riset pertama antara anchor user dan institut riset terpilih.

4. Tujuan pengembangan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 adalah menjadi “Solusi atap untuk adopsi Industri 4.0 di Indonesia” yang didukung oleh 5 pilar utama, yaitu:
 - a. Show case center untuk meningkatkan kesadaran mengenai Industri 4.0 dengan menunjukkan “perusahaan model” untuk industri makanan & minuman (F&B) dan otomotif;
 - b. Capability center untuk membangun kapabilitas i4.0 bagi perusahaan-perusahaan Indonesia di setiap tingkatan dalam organisasi (mulai dari level CxO hingga front line);
 - c. Ekosistem Industry 4.0 untuk menghubungkan semua pemangku kepentingan i4.0 yang berpengaruh untuk memberikan keahlian dan kapabilitas khusus mereka untuk Indonesia;
 - d. Delivery center untuk membantu perusahaan-perusahaan pada saat perjalanan mereka mengadopsi Industri 4.0 – mulai dari tahap penilaian (INDI 4.0) hingga implementasi;
 - e. Innovation Center dalam pelayanan pengujian dan penelitian.yang didukung oleh landasan organisasi, tata kelola dan kapabilitas kuat serta model bisnis berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun mendatang;
5. Konsep kerjasama pengembangan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 melingkupi:
 - a. Menyempurnakan visi strategis DCC Permata Hijau;
 - b. Membangun end-to-end showcase untuk industri otomotif dan F&B;
 - c. Mengembangkan capability center;

- d. Mengembangkan ekosistem dan pelaksanaan industry 4.0 di Indonesia;
 - e. Merancang Delivery center untuk menangani 2 inisiatif utama penilaian dan implementasi;
 - f. Membangun innovation center di Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 dengan 2 proposisi utama: sebagai sarana pengujian dan menjembatani penelitian;
 - g. Menetapkan organisasi dan kapabilitas sebagai landasan bagi Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 untuk mempertahankan operasionalnya.
6. Dukungan kelembagaan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 antara lain:
- a. Kelompok pimpinan inti dengan kombinasi berbagai pengalaman;
 - b. Tim kerja inti yang terdiri dari Project Manager berpengalaman yang dibantu oleh beberapa orang konsultan;
 - c. Kumpulan tenaga ahli regional inti yang mewakili beberapa industri utama yaitu F&B dan otomotif;
 - d. Dewan penasihat global yang memiliki pengetahuan dalam industri otomotif dan F&B

Disamping itu, pembangunan kompetensi SDM untuk mendukung industri 4.0 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pelatihan SDM bidang Industri 4.0
- b. Pusat Inovasi & Lembaga Riset Industri 4.0
- c. Pengembangan Politeknik mendukung Industri 4.0

Dan kompetensi teknis yang dikembangkan diantaranya:

1. Internet of Things

- Sensor & Actuator
- Hardware
- Network
- Coding & Programming
- Apps Developing

2. Big Data

- Analisis & Komputasi Data
- Advance Database
- Data Warehouse
- Data Cyber Security

3. Artificial Intelligence

- Robotic
- Sistem Informasi
- Micro Controller

4. Augmented/ Virtual Reality

5. Cloud Computing

- Infrastructure as a service (IAAS)
- Platform as a service (PAAS)
- Software as a service (SAAS)

6. Digital Production Manufacturing

- Flexible Manufacturing System
- Additive Manufacturing

7. Softskill Flexibility

3.4 PROGRAM

Program Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yaitu Program Pengembangan SDM Industri.

3.5 KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri adalah Peningkatan Peningkatan Kualitas SDM Industri. Adapun aktivitas-aktivitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis diatas antara lain:

No	Kegiatan	Sasaran
1	Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I• Penyediaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal• Tersedianya Gaji dan Layanan Operasional
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem	<ul style="list-style-type: none">• Terbangunnya Pusat inovasi dan pelatihan SDM dalam menghadapi era industri 4.0• Diklat Industri 4.0

Tabel 3.1 Kegiatan Set. BPSDMI

3.6 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka menciptakan iklim usaha di bidang industri, maka kerangka regulasi merupakan instrumen yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pembangunan industri nasional. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Rpermen Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemen Naker, BNSP	2022
2	Rpermen Pengembangan SMK Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industr	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen Dikdas Kemendikbud dan BNSP	2022
3	Rpermen Pengembangan Lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemen Naker, BNSP	2022
4	Rpermen Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Kemen Ristek Dikti dan BNSP	2022
5	Rpermen Pengelolaan Inkubator Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemen Naker,	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Berbasis Kompetensi			BNSP	
6	Rpermen Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dengan Sistem 3 in 1	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin	2022
7	Rpermen Pengembangan ASN Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Badan Kepegawaian Negara dan Kemen PAN & RB	2022

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi BPSDMI

3.7 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta visi misi dan Nawa Cita Kabinet Kerja 2020-2024, beberapa hal pokok yang menjadi implikasi utama pada keorganisasian perindustrian, yaitu:

1. Pentingnya mengintegrasikan pembangunan industri dari hulu ke hilir dalam rangka penguatan struktur industri melalui pendekatan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah (supply-value chain);
2. Pentingnya mengembangkan industri pendukung (supporting industri) yang efektif yang dapat diperankan oleh IKM untuk penguatan struktur industri;
3. Pentingnya penyebaran industri ke luar Jawa melalui pendekatan perwilayahan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dalam penciptaan

nilai tambah dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam nasional yang tersebar;

4. Pentingnya peningkatan potensi kolaborasi dalam rantai pasokan global (global supply chain); dan
5. Pentingnya dukungan dan penguasaan teknologi untuk percepatan pembangunan industri terutama dalam penciptaan nilai tambah tanpa mengabaikan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kelima implikasi tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, serta pendidikan vokasi industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permenperin Nomor 35 Tahun 2018, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- d. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- e. Koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- f. Koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

- g. Koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kearsipan, pelayanan publik, hubungan masyarakat, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.



Gambar 3.6 Struktur Organisasi Sekretariat BPSDMI

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang dijabarkan pada bab III. Berikut ini program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2020-2024:

No.	Sasaran Program (Outcome)/ Output/ Indikator	Target Kinerja Jangka Menengah 2020- 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(Tj) Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional						
Program Dukungan Manajemen						
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri						
SK 1	Pengembangan Pendidikan Vokasi insutri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System					
	1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	70	72	74	76	78
SK 2	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkeperibadian					

	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	70	71	73	76	80
--	---	---	----	----	----	----	----

No.	Sasaran Program (Outcome)/ Output/ Indikator		Target Kinerja Jangka Menengah 2020- 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK 3	Terwujudnya Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	70	72	74	76	78
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	70	72	74	76	78
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System							
SK 1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
	1	Pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0	5%	5%	7%	9%	95%
	2	ASN dan tenaga kerja industri yang kompeten di bidang industri 4.0	500	600	700	800	500
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System							
SK 1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
	1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	-	1	2	3	4

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. kebutuhan pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (Rp Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen											
6043	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri						19	15,3	15,3	15,3	15,3
	- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	15,11	19	19	19	19
	- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	- Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	32,59	34,22	35,90	37,70	39,32

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan TUPOKSI Sekretariat Jenderal dan UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan Key Performance Indicator (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri akan direviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Tabel 1
Matrik Kinerja dan Anggaran Renstra Kemenperin 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN							2.093	5.000	5.000	5.000	5.000		
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB Industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
2	Kontribusi Industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
3	Tenaga kerja di sektor Industri nonmigas	Juta Orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
4	Nilai ekspor produk Industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	Persen	15	15,2	15,4	15,5	15,7						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp. Juta/orang/tahun	111,8	113,8	116,7	120,3	124,7						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
3	Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai	1,99	2,03	2,06	2,11	2,15						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
4	Nilai Investasi sektor Industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	256,3	326,7	425,3	566,2	769,1						IA, ILMATE, IKFT dan KPAIL
5	Persentase hasil riset 5(lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30						BPPI
6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	75	79	82	85	88						BPSDMI
7	Lulusan pelatihan vokasi Industri berbasis kompetensi	Orang	36.000	74.000	110.000	137.000	157.000 (kumulatif)						BPSDMI
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0</i>	Perusahaan	30	36	44	52	60						IA, ILMATE, IKFT dan BPPI
2	Kontribusi ekspor produk Industri berteknologi tinggi	Persen	13	13,15	13,30	13,50	13,70						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
3	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)						IKMA
4	Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten	Orang	500	500	500	500	500						BPSDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri												
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0	-	-	-	-	-	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48	-	-	-	-	-	Setjen
3	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)	-	-	-	-	-	Setjen
4	Persentase SNI bidang Industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20	-	-	-	-	-	BPPI
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri												
1	Pertumbuhan ekspor Industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	6,4	7,3	8,6	10,1	-	-	-	-	-	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
2	Kontribusi ekspor produk Industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	74,3	74,9	75,5	76	76,5	-	-	-	-	-	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
3	Rasio impor bahan baku sektor Industri terhadap PDB sektor Industri nonmigas	Persen	37,80	37,30	37,10	37,00	36,80	-	-	-	-	-	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
4	Penambahan jenis produk Industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32	-	-	-	-	-	KPAII
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)												
1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah Industri pengolahan nonmigas	Persen	18,60	18,80	19,20	19,60	20	-	-	-	-	-	IKMA
2	Wirausaha Industri kecil yang tumbuh	WUB	4000	8000	12000	16000	20.000 (kumulatif)	-	-	-	-	-	IKMA
3	IKM yang melakukan kemitraan dengan Industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	50	120	190	265	340 (kumulatif)	-	-	-	-	-	IKMA
4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,40	2,75	3,35	4,05	5	-	-	-	-	-	IKMA
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri												
1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan Investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)	-	-	-	-	-	KPAII
4	Persentase nilai tambah sektor Industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1	-	-	-	-	-	KPAII

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	5 Sentra Industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44	-	-	-	-	-	IKMA
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif												
1	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80	-	-	-	-	-	Setjen
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan												
1	Perusahaan Industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)	-	-	-	-	-	BPPI
2	Infrastruktur kompetensi Industri	SKKNI	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	BPSDMI
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien												
1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	-	-	-	-	-	Itjen
2	Rekomendasi hasil pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-	Itjen
3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4	-	-	-	-	-	Itjen
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian												
1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian	Nilai	70	71	73	76	80	-	-	-	-	-	Setjen
2	ASN yang meningkat kompetensinya	Orang	500	550	600	650	700	-	-	-	-	-	Setjen
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas												
1	Data dan Informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18	-	-	-	-	-	Setjen
2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Informasi baku secara periodik	Persen	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Setjen
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	Setjen
2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	-	-	-	-	-	Setjen
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel												
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	96	96,5	97	97,5	-	-	-	-	-	Setjen
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80	-	-	-	-	-	Setjen

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju Industri 4.0	Perusahaan (akumulasi)	3	6	9	12	15	-	-	-	-	-	Puslitbang IKFTLMATE
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri							504,42	540,46	637,19	665,98	639,34		
SK1	Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	Persen	15	17	20	25	30	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI
2	Perusahaan Industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	31	50	80	110	140	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI
SK2	Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	20	22	25	28	35	-	-	-	-	-	Balai Besar, Baristand, BPPSI
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							754	985	985	985	985		
SP1	Meningkatkan Tenaga Kerja Industri yang Kompeten												
1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	36.000	38.000	36.000	27.000	20.000	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
2	Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya	Orang	3.200	4.000	5.000	5.900	6.400	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi Internasional	Orang	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	-	-	-	-	-	PPKVI
4	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	75	79	82	85	88	-	-	-	-	-	PPKVI
SP2	Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri												
1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan Industri	Perusahaan	170	180	190	200	210	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	B	B	B	B	A	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Penelitian yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan Internasional	Penelitian	140	160	200	230	250	-	-	-	-	-	PPKVI
4	Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	Orang	125	140	190	220	260	-	-	-	-	-	PPKVI
5	Implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Pilot Project	34	44	55	66	77	-	-	-	-	-	Set.BPSDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP3	Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri												
1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industri	SKKNI	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang Industri	LSP dan TUK	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	290	300	310	320	330	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
4	Wirusaha Industri yang tumbuh	WUB	150	180	200	220	240	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri							42,32	55,71	57,30	59,08	60,71		
SK1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri												
1	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
SK2	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri												
1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Indeks	70	71	73	76	80	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
SK3	Terwujudnya Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Persen	70	72	74	76	78	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri							149,45	274,47	265,97	223,99	190,90		
SK1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
1	Tenaga kerja Industri yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi	Orang	20.000	20.000	10.000	10.000	5.000	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
2	Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja Industri	Orang	36000	38000	36000	27000	20000	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
SK2	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri												
1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industri	SKKNI	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang Industri	LSP dan TUK	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	290	300	310	320	330	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
4	Wirausaha Industri yang tumbuh	WUB	150	180	200	220	240	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System							341,12	391,15	384,95	406,21	421,62		
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Tenaga kerja Industri tingkat ahli yang kompeten	Orang	2.500	2.600	2.800	2.900	2.900	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Tenaga kerja Industri lulusan D1 Industri yang kompeten	Orang	700	800	900	1000	1000	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya	Orang	3200	4000	5000	5900	6400	-	-	-	-	-	PPKVI
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Pilot Project	9	12	17	22	27	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Pusat Inovasi dan pengembangan Industri 4.0	Utilisasi	30%	50%	70%	90%	95%	-	-	-	-	-	Set.BPSDMI
3	ASN dan tenaga kerja Industri yang kompeten di bidang Industri 4.0	Orang	500	600	700	800	500	-	-	-	-	-	Set.BPSDMI
SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
1	Ijin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri di WPPI / KI	Unit	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI	Unit	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Penelitian yang didesiminasikan	Penelitian	140	160	200	230	250	-	-	-	-	-	PPKVI
4	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	B	B	B	B	A	-	-	-	-	-	PPKVI
5	Prosentase lulusan program studi keteknikan Industri	Persen	97%	97%	97%	98%	99%	-	-	-	-	-	PPKVI
6	Prosentase lulusan sekolah Industri yang terserap oleh sektor Industri	Persen	78	81	85	86	89	-	-	-	-	-	PPKVI
7	Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	Orang	125	140	190	220	260	-	-	-	-	-	PPKVI
8	Perusahaan yang memanfaatkan layanan Industri	Perusahaan	170	180	190	200	210	-	-	-	-	-	PPKVI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System							207,37	248,28	261,39	280,33	296,38		
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Tenaga kerja Industri terampil yang kompeten	Orang	2000	2100	2200	2400	2000	-	-	-	-	-	PPKVI
2	Calon tenaga kerja program <i>dual system</i> yang meningkat kompetensinya	Orang	1000	1200	1500	1800	2100	-	-	-	-	-	PPKVI
3	Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi Internasional	Orang	1000	1100	1200	1300	1400	-	-	-	-	-	PPKVI
4	Prosentase lulusan program studi keteknikan Industri	Persen	97%	97%	97%	98%	99%	-	-	-	-	-	PPKVI
5	Prosentase lulusan sekolah Industri yang terserap oleh sektor Industri	Persen	73	76	80	84	86	-	-	-	-	-	PPKVI
6	Pengembangan SMK berbasis kompetensi yang Link and Match dengan Industri	SMK	965	965	965	965	965	-	-	-	-	-	PPKVI
7	Guru produktif kompeten yang mengikuti pelatihan dan pemagangan	Orang	4160	4160	2080	2080	2080	-	-	-	-	-	PPKVI
8	Insentif Silver Expert	Orang	144	144	144	144	144	-	-	-	-	-	PPKVI
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>												
1	Implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Pilot Project	25	32	38	44	50	-	-	-	-	-	Set. BPSDMI
Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN							13,77	15,39	15,39	15,39	15,39		
SK1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian												
1	ASN yang meningkat kompetensinya	ASN	500	550	600	650	700	-	-	-	-	-	Pusdiklat Industri



**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Kementerian Perindustrian**

Jl. Widya Chandra VIII No.34, RT.3/RW.1, Senayan, Kec. Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950